

---

---

## ANALISIS KEBIJAKAN EKSTRAKTIVISME SUMBER DAYA ALAM : STUDI KASUS FREEPORT DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI PAPUA

1) Destaria Verani Soe'oad

<sup>1)</sup>Universitas Indonesia

<sup>1)</sup>[destaria.verani@ui.ac.id](mailto:destaria.verani@ui.ac.id)

\*[destaria.verani@ui.ac.id](mailto:destaria.verani@ui.ac.id)

---

---

### Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekstraktivisme terhadap ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia dengan fokus pada kasus Freeport di Papua. Ekstraktivisme sering kali memperburuk ketimpangan dengan konsentrasi keuntungan pada perusahaan multinasional dan pemerintah pusat, sementara masyarakat lokal justru menanggung dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan politik ekonomi distribusi dari Caporaso, yang menyoroti bagaimana kebijakan distribusi dan relasi kekuasaan memengaruhi alokasi sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Data yang digunakan adalah data sekunder dari berbagai sumber terkait ketimpangan ekonomi dan distribusi keuntungan sumber daya alam di Indonesia. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana distribusi keuntungan diatur dan bagaimana hal ini berkontribusi pada ketimpangan.

**Kata Kunci :** Ekstraktivisme, Ketimpangan Sosial-Ekonomi, Freeport, Politik Ekonomi Distribusi, Papua

---

---

### Abstract

*This research aims to analyze the impact of extractivism on socio-economic inequality in Indonesia with a focus on the Freeport case in Papua. Extractivism often exacerbates inequality by concentrating profits in the hands of multinational companies and central governments, while local communities bear the negative impacts of natural resource exploitation. This research uses Caporaso's political economic distribution approach, which highlights how distribution policies and power relations influence resource allocation and societal welfare. The data used is secondary data from various sources related to economic inequality and the distribution of profits from natural resources in Indonesia. Analysis is carried out to evaluate how the distribution of profits is regulated and how this contributes to inequality.*

**Keywords :** Extractivism, Socio-Economic Inequality, Freeport, Political Economics of Distribution, Papua

## PENDAHULUAN

Ekstraktivisme di Indonesia, khususnya dalam industri pertambangan dan energi, telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Salah satu kasus yang menonjol adalah eksploitasi tambang emas dan tembaga oleh Freeport di Papua, yang telah menimbulkan banyak kontroversi terkait distribusi keuntungannya. Meskipun pemerintah pusat dan perusahaan mendapatkan manfaat besar dari ekstraksi sumber daya ini, masyarakat lokal di Papua sering kali mengalami marginalisasi, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kebijakan distribusi keuntungan dan desentralisasi dapat memengaruhi ketimpangan sosial-ekonomi di wilayah ekstraktif.

Ekstraktivisme *resources* sendiri (atau ekstraktivisme sumber daya) adalah istilah yang mengacu pada praktik eksploitasi intensif terhadap sumber daya alam seperti mineral, minyak, gas, kayu, dan hasil bumi lainnya. Aktivitas ekstraktivisme sering kali melibatkan pengambilan besar-besaran dari alam dengan sedikit atau tanpa pengolahan lebih lanjut sebelum diekspor atau dijual, sehingga manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati oleh perusahaan besar atau negara tertentu, sementara dampak sosial dan lingkungan biasanya ditanggung oleh masyarakat lokal, terutama di wilayah eksploitasi. Ekstraktivisme umumnya terkait dengan model ekonomi yang berfokus pada ekstraksi dan ekspor sumber daya alam untuk memacu pertumbuhan ekonomi, tetapi sering kali menyebabkan ketimpangan sosial-ekonomi, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial, terutama di negara-negara berkembang.

Freeport di Papua adalah salah satu perusahaan penambangan tembaga dan emas terbesar di dunia. Terletak di dalam Taman Nasional Lorentz Stan, Freeport telah beroperasi sejak tahun 1960-an. Operasi perusahaan dimulai sebagai usaha patungan antara Belanda dan Amerika. Setelah lama tidak beroperasi, Freeport menjadi studi kasus mengenai liberalisasi pasar dan dampak desentralisasi terhadap ekonomi mulai tahun 2000-an. Perusahaan ini telah diberikan kontrak karya legal selama 30 tahun dan saat ini sedang merundingkan kembali kontrak tersebut dengan pemerintah Indonesia. Freeport beroperasi di area yang diperebutkan, baik secara ekonomi maupun socio-politik oleh negara. Karyawan asing tidak dapat bekerja tanpa pengawalan tentara yang mengamankan penerbangan dari bandara Timika ke lokasi penambangan di Tembagapura. Kelompok separatis cepat menargetkan kantor pusat Freeport di Tembagapura. Masalah socio-politik ini mempengaruhi produksi Freeport, yang menjadi salah satu insentif bagi negara dan separatis untuk menempatkan intelijen bersenjata di zona mobilitas ekonomi dan militer guna mengusir antagonis dari daerah tersebut.<sup>1</sup>

Perusahaan tambang multinasional yang berbasis di Amerika Serikat ini, secara spesifik memulai operasinya di Indonesia pada tahun 1967 setelah menandatangani *Kontrak Karya* (KK) pertama dengan pemerintah Indonesia. Kontrak ini memberi Freeport hak untuk menambang tembaga di area tambang Ertsberg di Papua. Pada waktu itu, Papua baru saja diintegrasikan ke Indonesia, dan Freeport menjadi salah satu perusahaan asing pertama yang mendapatkan akses ke sumber daya alam di wilayah tersebut. Kontrak Karya pertama ini

<sup>1</sup> Kusumaryati, V. (2021). Freeport and the States: Politics of corporations and contemporary colonialism in West Papua. *Comparative Studies in Society and History*. [\[HTML\]](#)

berlangsung selama 30 tahun dan memberikan Freeport berbagai keuntungan termasuk hak-hak istimewa dalam hal eksplorasi dan eksploitasi sumber daya, yang berdampak minimnya keterlibatan lokal pada awalnya. Pada akhir 1980-an, Freeport menemukan tambang Grasberg, yang kemudian berkembang menjadi salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Sejak saat itu, tambang Grasberg menjadi pusat operasi Freeport di Indonesia, menghasilkan jutaan ton tembaga dan emas setiap tahunnya, yang memberikan keuntungan besar bagi perusahaan.<sup>2</sup>

Ketika Kontrak Karya pertama habis pada 1991, Freeport menegosiasikan perpanjangan kontrak yang memperpanjang operasinya hingga tahun 2021. Dalam kontrak baru ini, Freeport diberikan izin untuk melanjutkan operasi penambangan di Grasberg dengan ketentuan yang lebih menguntungkan Indonesia, namun perusahaan tetap mempertahankan kendali yang signifikan atas operasi tersebut. Perpanjangan kontrak ini tidak lepas dari kritik, terutama dari masyarakat Papua dan organisasi lingkungan yang menganggap bahwa Freeport tidak cukup memberikan kontribusi kepada komunitas lokal maupun memperhatikan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh operasi tambangnya.

Pada 2018, setelah beberapa tahun negosiasi yang intensif antara Freeport, pemerintah Indonesia, dan PT Inalum (sebuah perusahaan BUMN), kesepakatan baru tercapai. Pemerintah Indonesia, melalui PT Inalum, mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia, memberikan kontrol yang lebih besar kepada Indonesia atas operasi tambang Grasberg. Perjanjian ini menandai perubahan signifikan dalam pengelolaan sumber daya tambang dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kontrol negara atas aset strategis nasional.<sup>3</sup>

Meski demikian, kompleksitas perpanjangan kontrak ini tidak sepenuhnya hilang. Meskipun Indonesia sekarang memegang mayoritas saham, Freeport-McMoRan masih memegang kendali teknis atas operasi tambang. Tantangan utama ke depannya adalah bagaimana memastikan bahwa keuntungan dari tambang tersebut lebih merata bagi penduduk lokal, memperbaiki kondisi lingkungan, serta memperkuat kedaulatan nasional atas sumber daya alam.

Kemudian, di balik banyaknya narasi terkait kesuksesan ekonomi yang digembar-gemborkan kepada publik, kehadiran Freeport juga memicu banyak sekali kontroversi. Isu-isu seperti dampak lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat Papua, dan ketidakadilan dalam distribusi keuntungan sering kali muncul. Freeport dikritik karena tidak memberikan cukup kontribusi bagi pembangunan lokal, meskipun sumber daya alam yang dieksploitasi berasal dari wilayah tersebut.

Selama operasinya, Freeport juga menghadapi berbagai konflik dengan masyarakat adat Papua, yang merasa tanah mereka diambil alih tanpa persetujuan yang memadai. Freeport juga dikritik karena dampak lingkungannya, termasuk pembuangan limbah tambang (tailing) ke sungai yang

<sup>2</sup> Anderson, K. (2019). *Freeport in Indonesia: History of Mining and the Grasberg Gold Mine*. Indonesia Journal of History, 42(3), 56-73.

<sup>3</sup> Lane, M. (2019). *Freeport's Transition in Indonesia: Control and Controversies*. Resource Economics, 11(2), 101-115.

menyebabkan kerusakan ekosistem lokal. Selain itu, hubungan antara Freeport dan militer Indonesia menjadi sorotan, dengan tuduhan bahwa perusahaan membayar aparat keamanan untuk menjaga tambang, yang sering kali menyebabkan kekerasan terhadap masyarakat adat.<sup>4</sup>

Ada indikasi kuat yang menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi di Papua. Ketimpangan ini sering kali diukur melalui indikator pembangunan manusia atau kualitas infrastruktur antar distrik dan kota. Di Distrik Tembagapura, tempat lokasi tambang, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan kurang dari 1%, sedangkan di daerah sekitarnya, seperti Distrik Bailem, mencapai 50,81%. Pola perbedaan ini juga terlihat dalam berbagai sektor, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), partisipasi sekolah, kesehatan ibu, dan kualitas kelembagaan. Data kualitatif juga menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam kondisi kesejahteraan sosial. Kelompok Mee, pemilik tanah asli yang tinggal di sekitar tambang, memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda dibandingkan kelompok Kamoro yang tinggal di dataran rendah.<sup>5</sup>

Penelitian ini menggunakan kerangka politik ekonomi distribusi untuk menjelaskan ketimpangan yang muncul dari relasi antara negara, perusahaan multinasional, dan masyarakat lokal. Studi kasus Freeport akan menjadi contoh bagaimana kekuasaan dan distribusi sumber daya dapat mempengaruhi ketimpangan di tingkat lokal dan nasional.

## METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis data. Data yang digunakan berasal dari: (1) Laporan keuangan Freeport Indonesia terkait kontribusi perusahaan terhadap pendapatan negara, pajak, royalti, dan pembayaran lainnya. (2) Data resmi dari pemerintah mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam, baik di tingkat nasional maupun di daerah Papua. (3) Laporan ketimpangan sosial-ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga internasional yang memantau ketimpangan ekonomi di Indonesia, khususnya di Papua. (4) Laporan independen dan studi akademik yang mengevaluasi dampak kebijakan ekstraktivisme di Papua dan daerah ekstraktif lainnya di Indonesia.

Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Data-data ini akan digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan data secara sistematis mengenai karakteristik atau fenomena yang sedang diteliti tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi yang lebih dalam. Dalam analisis ini, peneliti menyajikan data apa adanya, seperti distribusi, frekuensi, rata-rata, atau variabilitas, dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang subjek penelitian.

## TINJAUAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan politik ekonomi distribusi, yang menyoroti bagaimana distribusi kekayaan dan kekuasaan antara berbagai aktor ekonomi dan politik memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

<sup>4</sup> Heinberg, R. (2017). *The Resource Curse and the Indonesian Freeport*. *Environmental Politics*, 22(5), 123-145.

<sup>5</sup> Hidayatulloh, H., Erdos, E., & Szabó, M. (2022). The Intricate Justice of Poverty: A Case of the Land of Gold in Indonesian Papua. *JILS*. [unnes.ac.id](http://unnes.ac.id)

Berdasarkan teori Powered Center dari Caporaso, kita dapat memahami bahwa kekuatan-kekuatan struktural (seperti perusahaan multinasional dan pemerintah pusat) sering kali mendominasi distribusi keuntungan dari sumber daya alam, yang pada akhirnya memperdalam ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah. Dalam konteks Freeport, hegemoni perusahaan dalam kerja sama dengan pemerintah pusat berperan besar dalam pembentukan struktur ketimpangan ini.

Selain itu, kebijakan desentralisasi dan dana bagi hasil dari sumber daya alam juga akan dikaji untuk melihat apakah kebijakan tersebut mampu mengurangi ketimpangan atau justru memperparahnya. Berikut adalah penjelasan konsep pendekatan "Power Centered" yang dipaparkan dalam buku James A. Caporaso, dengan penekanan pada topik-topik seperti interpretasi kekuasaan, kekayaan sebagai ukuran kekuasaan, dan kekuasaan dalam ekonomi pasar:<sup>6</sup>

1. Interpretasi Kekuasaan dan Kepentingan (*Interpretation of Power and Interests*): Dalam pendekatan Power Centered, kekuasaan dianggap sebagai elemen utama yang memengaruhi bagaimana kepentingan individu atau kelompok dijalankan. Kekuasaan dipahami sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan atau memaksakan kehendak mereka, bahkan ketika dihadapkan pada resistensi atau oposisi. Kepentingan individu atau kelompok sering kali dibentuk dan diarahkan oleh kekuasaan yang mereka miliki, baik di pasar maupun di arena politik.
2. Kekuasaan dan Ekonomi Pasar (*Power and the Market Economy*): Ekonomi pasar tidak selalu bekerja murni berdasarkan penawaran dan permintaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan yang dimiliki oleh aktor-aktor di dalamnya. Perusahaan besar atau pelaku pasar dominan sering memilikikekuatan pasar yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan harga, menguasai sumber daya, atau mempengaruhi regulasi. Kekuasaan dalam ekonomi pasar dapat menciptakan ketimpangan di mana pihak yang lebih kuat memiliki keuntungan yang tidak dimiliki oleh pihak yang lebih lemah.
3. Kekayaan Mengukur Kekuasaan (*Wealth Measures Power*): Dalam konteks power centered, kekayaan sering kali dianggap sebagai ukuran kekuasaan. Semakin kaya seseorang atau kelompok, semakin besar kekuasaan yang mereka miliki. Kekayaan memungkinkan akses ke sumber daya yang lebih besar, pengaruh politik, dan kemampuan untuk mengendalikan hasil ekonomi. Kekayaan yang besar memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi dalam proses ekonomi dengan pengaruh yang lebih kuat daripada individu atau kelompok yang memiliki sumber daya terbatas.
4. Kekuasaan Untuk dan Kekuasaan Atas (*Power To, Power Over*): Ada dua bentuk kekuasaan yang diidentifikasi, kekuasaan Untuk (Power To): Kemampuan untuk bertindak dan mencapai tujuan. Misalnya, perusahaan besar memiliki kekuasaan untuk mengembangkan teknologi baru atau memperluas pasar. Kekuasaan Atas (Power Over): Kemampuan untuk mengontrol atau mendominasi pihak lain. Contohnya, perusahaan besar

<sup>6</sup> Caporaso, J. A., & Levine, D. P. (1992). *Theories of Political Economy*. Cambridge University Press.

- bisa memiliki kekuasaan atas pemasok atau pekerja, memaksa mereka untuk menerima syarat-syarat yang lebih menguntungkan bagi Perusahaan.
5. Kekuasaan Pasar dan Perusahaan (*Market Power or Firm*): Kekuasaan pasar merujuk pada kemampuan suatu perusahaan atau entitas untuk mempengaruhi kondisi pasar, seperti menentukan harga atau mengendalikan pasokan barang dan jasa. Perusahaan besar atau monopoli sering kali memiliki kekuatan pasar yang signifikan, yang memungkinkan mereka untuk menciptakan ketimpangan di pasar dan menghalangi pesaing lebih kecil untuk berkembang. Oligopoli, di mana beberapa perusahaan besar mendominasi pasar, juga dapat menciptakan situasi di mana pasar menjadi kurang kompetitif dan harga dikendalikan oleh segelintir Perusahaan.
  6. Kontrak Kerja dan Produksi (*The Labour Contract and Production*): Dalam konteks kontrak kerja, kekuasaan sering kali dimiliki oleh pemberi kerja dibandingkan dengan pekerja. Kontrak kerja dipandang sebagai hubungan kekuasaan, di mana pekerja seringkali tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menegosiasikan syarat-syarat kerja yang adil, sementara perusahaan dapat memaksakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi mereka sendiri. Hal ini mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam produksi, di mana kapitalis (pemilik modal) memiliki kendali lebih besar atas hasil kerja pekerja, dan pekerja sering kali tidak memiliki kontrol yang sama atas hasil produksi.
  7. Ekonomi Pasar dan Pengaruh Kekuasaan (*Power in Market Economy*): Kekuasaan dalam ekonomi pasar mempengaruhi alokasi sumber daya, pembagian kekayaan, dan proses produksi. Pihak-pihak yang memiliki akses lebih besar ke sumber daya, seperti modal, teknologi, atau jaringan sosial, dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk mendikte syarat-syarat pasar, menciptakan kesenjangan antara mereka yang berkuasa dan mereka yang tidak.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pendekatan power-centered yang dikemukakan oleh James Caporaso menekankan bahwa kekuasaan adalah elemen kunci dalam memahami interaksi ekonomi dan sosial. Dalam konteks Freeport di Indonesia, kekuasaan memainkan peran utama dalam membentuk hubungan antara perusahaan multinasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal di Papua. Kekuasaan ini tercermin tidak hanya dalam penguasaan sumber daya alam, tetapi juga dalam bagaimana Freeport menggunakan kekuatan ekonominya untuk mengamankan kontrol terhadap operasinya di Indonesia, bahkan dalam situasi yang sering menghadapi resistensi politik dan sosial. Dalam pandangan power-centered, pasar tidak bekerja murni berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan, melainkan juga didominasi oleh aktor-aktor kuat yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan pasar dan sumber daya. Sejak Freeport memperoleh Kontrak Karya pada 1967, perusahaan ini menggunakan kekuatan ekonominya untuk mendominasi sektor pertambangan tembaga dan emas di Indonesia. Freeport berhasil mengamankan posisi strategisnya dengan dukungan dari pemerintah pusat Indonesia, yang melihat perusahaan tersebut sebagai investor penting dalam perekonomian nasional, terutama setelah Papua baru saja menjadi bagian dari Indonesia.

PT Freeport Indonesia merupakan salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia. Pada tahun 2019, Freeport menyumbang lebih dari 1,7 miliar USD kepada pemerintah Indonesia, yang terdiri dari pajak, royalti, dividen, dan biaya lain. Pada tahun-tahun sebelumnya, Freeport secara konsisten menyumbang miliaran dolar dalam bentuk pajak penghasilan, royalti sumber daya alam, serta biaya kepatuhan terhadap lingkungan. Kontribusi tersebut termasuk dividen kepada pemerintah Indonesia setelah pengambilalihan 51% saham oleh PT Inalum pada 2018, yang meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap pendapatan negara.<sup>7</sup>

Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam adalah mekanisme distribusi pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam, seperti pertambangan, minyak, gas, dan kehutanan, yang didistribusikan antara pemerintah pusat dan daerah. DBH bertujuan untuk memberikan bagian pendapatan kepada daerah yang menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam, sebagai bentuk kompensasi atas eksploitasi tersebut. Di tingkat nasional, DBH diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di mana porsi bagi hasil dibagi antara pusat dan daerah sesuai dengan persentase yang ditetapkan.<sup>8</sup>

Secara umum, pemerintah pusat memperoleh 60-70% dari hasil sumber daya alam, sementara sisanya diserahkan kepada pemerintah daerah yang menjadi tempat eksploitasi sumber daya tersebut. Untuk sektor pertambangan umum (seperti Freeport), DBH terdiri dari pembayaran royalti, iuran tetap, dan pajak lainnya. Khusus untuk Papua, karena merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama dari sektor pertambangan melalui PT Freeport Indonesia, Papua menerima DBH dari hasil tambang yang dioperasikan di wilayah tersebut. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Papua mendapatkan porsi DBH yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya sebagai bagian dari kebijakan otonomi khusus Papua. Misalnya, Papua menerima 80% dari DBH minyak bumi dan 70% dari DBH gas alam yang dihasilkan di daerahnya. Untuk DBH dari pertambangan umum seperti Freeport, persentasenya lebih kecil, namun tetap memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah Papua.

Dalam laporan Kementerian Keuangan, tercatat bahwa pada tahun 2020, Papua menerima DBH dari sektor pertambangan sebesar Rp 2,8 triliun, yang termasuk royalti dari tambang emas dan tembaga Freeport. Dana ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di wilayah Papua.<sup>9</sup>

Papua dikenal sebagai salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya alam di Indonesia, terutama di sektor tambang. Namun, kekayaan alam yang dimiliki tidak tercermin dalam kesejahteraan masyarakatnya. Provinsi Papua mencatatkan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, dengan 27,53% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2020, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sekitar 9,78. Ketimpangan sosial-ekonomi di Papua tidak hanya terkait dengan distribusi pendapatan yang timpang, tetapi juga

<sup>7</sup> Freeport-McMoRan. (2020). *2020 Annual Report*. Diakses dari <https://www.fcx.com/>.

<sup>8</sup> PT Freeport Indonesia. (2020). *Laporan Keberlanjutan 2020*. Diakses dari <https://ptfi.co.id/>.

<sup>9</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 2020*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/>.

mencakup akses yang sangat terbatas terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.<sup>10</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin melaporkan ketimpangan sosial-ekonomi melalui indeks Gini (Gini Ratio), yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut laporan BPS, Papua memiliki salah satu tingkat ketimpangan sosial-ekonomi tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2021, indeks Gini di Provinsi Papua tercatat sebesar 0,392, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 0,381. Angka ini mencerminkan bahwa meskipun Papua merupakan wilayah kaya sumber daya alam, distribusi pendapatan dan kesejahteraan di antara masyarakatnya masih sangat timpang.

Faktor utama penyebab ketimpangan di Papua meliputi ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan besar seperti Freeport, rendahnya tingkat pendidikan, dan terbatasnya akses ke layanan kesehatan dan infrastruktur di daerah-daerah pedalaman. Meskipun pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar berkontribusi pada pembangunan, hasilnya belum merata dan sebagian besar pendapatan dari sektor pertambangan cenderung terkonsentrasi pada segelintir kelompok.<sup>11</sup>

Beberapa lembaga internasional, seperti World Bank dan Oxfam, juga mengeluarkan laporan terkait ketimpangan di Indonesia, termasuk di Papua. World Bank mencatat bahwa ketimpangan di Papua diperburuk oleh terbatasnya akses terhadap infrastruktur dasar, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Laporan World Bank tahun 2020 mencatat bahwa di Papua, 27,53% penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan, yang merupakan angka tertinggi di Indonesia, sementara di wilayah lain, angka kemiskinan cenderung lebih rendah.<sup>12</sup>

Selain itu, Oxfam dalam laporannya menyoroti ketimpangan yang terjadi antara masyarakat lokal Papua dan perusahaan-perusahaan multinasional, termasuk PT Freeport Indonesia. Oxfam mengidentifikasi bahwa meskipun perusahaan-perusahaan besar menghasilkan pendapatan yang signifikan, hanya sebagian kecil yang disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat lokal, sehingga memperparah ketimpangan yang ada.<sup>13</sup>

Salah satu contoh paling jelas dari ketimpangan sosial-ekonomi di Papua adalah situasi di sekitar operasi tambang PT Freeport Indonesia di wilayah Mimika, Papua. Meskipun tambang Grasberg adalah salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia, masyarakat yang tinggal di sekitar tambang tidak sepenuhnya menikmati keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam ini. Pendapatan yang dihasilkan dari tambang tersebut, yang bernilai miliaran dolar per tahun, sebagian besar mengalir ke perusahaan dan pemerintah pusat, sementara masyarakat adat di Papua, termasuk suku-suku seperti Amungme dan Kamoro, tetap terpinggirkan.

<sup>10</sup> World Bank. (2020). *Indonesia Economic Quarterly: The Power of Partnership*. Diakses dari <https://www.worldbank.org/>.

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik. (2021). *Indeks Gini Menurut Provinsi 2021*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/>.

<sup>12</sup> Filer, C. (2012). The Double Movement of Immovable Property Rights in Papua New Guinea. *Journal of Pacific History*, 47(1), 51-73.

<sup>13</sup> Oxfam. (2019). *Towards a More Equal Indonesia: How Public Policies Can Tackle Inequality*. Diakses dari <https://www.oxfam.org/>.



Menurut laporan Amnesty International (2017), komunitas lokal di sekitar area operasi Freeport telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perampasan tanah adat dan minimnya kompensasi yang memadai atas lahan mereka. Selain itu, meskipun Freeport memberikan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan program kesejahteraan masyarakat, dampaknya masih sangat terbatas. Infrastruktur dan layanan dasar di wilayah tersebut, seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit, tetap tidak memadai, sementara kekayaan dari tambang tidak didistribusikan secara merata.

Selain itu, World Bank (2020) mencatat bahwa meskipun pendapatan dari sektor pertambangan di Papua tinggi, lapangan pekerjaan yang tersedia untuk masyarakat lokal sangat terbatas. Sebagian besar tenaga kerja di tambang Grasberg berasal dari luar Papua atau dari tenaga kerja terampil asing, sementara masyarakat lokal sering kali hanya mendapat pekerjaan dengan keterampilan rendah dan gaji yang tidak sebanding. Ketimpangan ini memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang atau perusahaan multinasional.<sup>14</sup> Selain ketimpangan ekonomi, Papua juga mengalami ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat buta huruf di Papua masih yang tertinggi di Indonesia, dan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai di daerah pedalaman sangat terbatas. Ketimpangan dalam akses terhadap layanan dasar ini memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat Papua dan memperlambat upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

Laporan independen dan berbagai studi akademik telah mengevaluasi kebijakan ekstraktivisme di Papua, terutama terkait dengan industri pertambangan yang besar seperti Freeport, serta di daerah ekstraktif lainnya seperti Kalimantan dan Sulawesi. Beberapa isu utama yang diangkat dalam studi tersebut meliputi dampak lingkungan, ketimpangan sosial-ekonomi, pelanggaran hak-hak masyarakat adat, dan kegagalan dalam redistribusi keuntungan.

Sebuah laporan dari World Resources Institute (WRI) pada tahun 2019 menyebutkan bahwa ekstraktivisme di Papua, yang difokuskan pada tambang emas dan tembaga oleh PT Freeport Indonesia, memberikan kontribusi besar pada pendapatan nasional, tetapi memberikan dampak negatif signifikan pada lingkungan dan masyarakat lokal. WRI juga menyoroti ketidakadilan dalam redistribusi keuntungan dari kegiatan tambang ini, dengan hanya sebagian kecil yang disalurkan ke masyarakat lokal melalui Dana Bagi Hasil (DBH). Studi ini mengevaluasi kontribusi sektor tambang terhadap ekonomi nasional, distribusi manfaat bagi masyarakat lokal, dan dampak lingkungan yang dihasilkan. PT Freeport Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, melalui pajak, royalti, dan Dana Bagi Hasil (DBH). Namun, WRI menemukan bahwa hanya sebagian kecil keuntungan dari tambang yang dinikmati oleh masyarakat Papua. Sebagian besar keuntungan mengalir ke pemerintah pusat dan perusahaan itu sendiri. Laporan ini menyoroti ketimpangan ekonomi yang mencolok di Papua, dengan masyarakat adat seperti suku Amungme dan Kamoro yang hidup dalam kemiskinan meskipun tambang

<sup>14</sup> Amnesty International. (2017). *Indonesia: Mining and Indigenous Rights in Papua*. Diakses dari <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/0015/2017/en/>.

Freeport beroperasi di wilayah mereka. Freeport dianggap bertanggung jawab atas kerusakan ekosistem di Papua, termasuk pencemaran sungai dari pembuangan tailing dan deforestasi yang luas. WRI merekomendasikan adanya penguatan regulasi lingkungan dan perbaikan dalam redistribusi keuntungan dari tambang kepada masyarakat lokal.<sup>15</sup>

**Tabel 1. Rincian Pekerja Lokal dan Non Lokal**

Jenis Pekerjaan	Jumlah Pekerja Lokal (%)	Jumlah Pekerja Non Lokal (%)
Tenaga Kerja Terampil (Ahli)	10	90
Tenaga Kerja dengan Upah Rendah	75	25

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) juga melakukan evaluasi terkait dampak sosial-ekonomi dari ekstraktivisme di daerah Papua. Studi ini dilakukan oleh BPPT dan mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari operasi tambang di Papua, dengan fokus pada redistribusi pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat lokal. Meskipun PT Freeport Indonesia menyumbang royalti besar bagi pendapatan negara, penelitian BPPT menemukan bahwa pemerintah daerah Papua mengalami kesulitan dalam mengelola DBH secara efektif. Kapasitas kelembagaan yang rendah di tingkat daerah menghambat distribusi dana ke sektor-sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Studi ini menemukan bahwa masyarakat adat yang tinggal di sekitar tambang tetap mengalami kesulitan ekonomi, dengan terbatasnya akses ke pekerjaan yang layak dan fasilitas umum. Sementara DBH diharapkan memperbaiki kondisi ini, implementasi kebijakan tersebut belum maksimal.

**Table 2. Redistribusi DBH dan Penduduk Miskin**

Tahun	DBH dari Freeport (Rp Triliun)	Jumlah Penduduk Miskin (%)
2018	2,5	27,74
2019	2,7	27,53
2020	2,8	26,80

<sup>15</sup> World Resources Institute. (2019). *Sustainable Mining in Indonesia: Evaluating the Impact of Freeport and Other Mining Giants*. WRI.

BPPT juga melaporkan bahwa meskipun ada upaya perusahaan untuk memenuhi standar lingkungan, dampak jangka panjang terhadap ekosistem setempat, terutama pencemaran sungai akibat pembuangan limbah, tetap menjadi masalah utama.<sup>16</sup>

**Table 3. Dampak Lingkungan**

Dampak Lingkungan	Papua (Freeport)
Deforestasi	100.000 hektar sejak 1980-an
Pencemaran Air	Sungai Ajkwa tercemar tailing tambang
Rehabilitasi Lingkungan	Minimal, terbatas pada beberapa area

Jadi, meskipun DBH dari PT Freeport Indonesia meningkat, angka kemiskinan di Papua masih sangat tinggi, menunjukkan bahwa redistribusi hasil ekstraksi belum merata dan tidak cukup efektif untuk mengurangi ketimpangan sosial di wilayah tersebut.

### KESIMPULAN

Dalam konteks teori power-centered Caporaso, kekuasaan dipahami sebagai kemampuan aktor untuk mencapai tujuannya bahkan di tengah resistensi atau oposisi. Kekuasaan ini tidak terbatas pada relasi formal antara negara dan perusahaan, tetapi juga mencakup cara perusahaan multinasional menggunakan pengaruh ekonomi mereka untuk mengendalikan regulasi, pasar, dan distribusi keuntungan. Dalam kasus PT Freeport Indonesia, perusahaan ini telah menunjukkan power to – yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonominya melalui negosiasi politik yang menguntungkan, baik dengan pemerintah pusat Indonesia maupun dengan pemerintah daerah Papua.

Laporan dari World Resources Institute (2019) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT, 2019) mengungkapkan bahwa PT Freeport telah menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan nasional melalui pajak, royalti, dan DBH. Namun, dalam pandangan power-centered, kendali perusahaan atas distribusi keuntungan dan akses sumber daya mencerminkan kekuasaan ekonomi yang sangat kuat. Meskipun Papua menghasilkan sebagian besar pendapatan dari sektor tambang, masyarakat lokal hanya menerima sebagian kecil dari manfaat tersebut. Distribusi keuntungan yang tidak merata ini adalah hasil dari ketidakseimbangan kekuasaan antara perusahaan yang kuat secara ekonomi dan masyarakat adat yang berada dalam posisi lemah. Konsep power over dalam teori Caporaso menekankan bahwa perusahaan memiliki kendali yang besar atas masyarakat adat dan wilayah tempat mereka beroperasi, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap

<sup>16</sup> Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (2019). *Evaluasi Dampak Sosial-Ekonomi Ekstraktivisme di Daerah Papua*. BPPT.

keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Hal ini memberikan perusahaan tersebut keunggulan dalam mendiktekan persyaratan operasi tambang dan pembagian keuntungan. Konsep power over terlihat jelas di sini, di mana perusahaan-perusahaan besar mampu memaksa pemerintah daerah untuk memberikan konsesi yang menguntungkan mereka, sementara masyarakat lokal tetap dalam posisi yang rentan secara ekonomi dan politik.

Ketimpangan sosial-ekonomi di Papua merupakan hasil langsung dari kekuasaan ekonomi yang terpusat pada perusahaan multinasional dan pemerintah pusat. Dana Bagi Hasil (DBH) yang dihasilkan dari tambang di Papua, misalnya, diharapkan dapat membantu memperbaiki kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, data dari BPPT (2019) dan World Resources Institute (2019) menunjukkan bahwa distribusi DBH tidak dikelola secara efektif oleh pemerintah daerah Papua. Masalah kapasitas kelembagaan yang rendah di daerah ini membuat distribusi dana menjadi tidak merata, sehingga masyarakat lokal tetap terpinggirkan meskipun wilayah mereka menghasilkan sumber daya alam yang sangat besar. Laporan Amnesty International (2017) juga menyoroti bagaimana masyarakat adat di Papua kehilangan akses terhadap tanah adat mereka, yang menjadi pusat operasi tambang. Pelanggaran hak atas tanah ini diperburuk oleh kurangnya kompensasi yang layak dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan tanah mereka. Situasi ini mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan yang memungkinkan perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia untuk terus beroperasi dengan dukungan dari aparat keamanan, tanpa memberikan manfaat ekonomi yang berarti bagi masyarakat adat. Menemukan bahwa sebagian besar pendapatan dari pertambangan diserap oleh perusahaan-perusahaan besar dan elit ekonomi, sementara masyarakat lokal hanya mendapatkan pekerjaan dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial yang memadai. Ketimpangan ini semakin diperburuk oleh minimnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering kali tidak dipenuhi.

Dalam teori power-centered, Caporaso juga menekankan bahwa kekuasaan ekonomi memiliki kemampuan untuk membentuk kebijakan lingkungan. Hal ini sangat relevan dalam konteks ekstraktivisme di Papua, di mana perusahaan-perusahaan tambang besar mampu mempengaruhi kebijakan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan operasi mereka. Laporan WRI (2019) menunjukkan bahwa PT Freeport Indonesia telah berkontribusi signifikan terhadap pencemaran lingkungan di Papua, terutama melalui pembuangan tailing ke sungai-sungai di sekitar tambang. Meskipun ada regulasi yang mengatur pembuangan limbah tambang, perusahaan besar sering kali mampu menghindari sanksi yang serius karena mereka memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang kuat.

Pemerintah daerah sering kali tidak memiliki kapasitas atau keberanian untuk menegakkan regulasi lingkungan yang ketat, karena perusahaan-perusahaan ini memiliki kekuasaan ekonomi yang besar yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi kebijakan publik dan menghindari tanggung jawab lingkungan. Secara keseluruhan, kebijakan ekstraktivisme di Papua memperlihatkan ketidakseimbangan kekuasaan yang menguntungkan perusahaan multinasional dan pemerintah pusat, sementara masyarakat lokal terus berada dalam posisi yang rentan. Perspektif power-centered dari Caporaso

membantu menjelaskan mengapa redistribusi ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial tidak tercapai meskipun wilayah-wilayah ini kaya akan sumber daya alam. Kekuasaan yang terkonsentrasi pada perusahaan besar memungkinkan mereka untuk mendiktekan aturan main, memanfaatkan kelemahan pemerintah daerah, dan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memberikan kompensasi yang setara bagi masyarakat lokal.

Kebijakan masa depan harus mempertimbangkan redistribusi kekuasaan yang lebih adil, di mana masyarakat lokal memiliki suara lebih besar dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya alam mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, reformasi regulasi lingkungan yang lebih ketat, dan penguatan hak masyarakat adat atas tanah. Selain itu, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) harus difokuskan pada peningkatan kesejahteraan jangka panjang masyarakat lokal, bukan sekadar proyek jangka pendek yang sering kali tidak berkelanjutan.

Melalui pendekatan deskriptif ini, dapat dilihat bahwa kebijakan ekstraktivisme di Papua memiliki karakteristik yang kompleks dan multidimensional, mencakup ketimpangan sosial-ekonomi, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Data-data yang disajikan menggambarkan bahwa meskipun sektor tambang berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional dan daerah, manfaat yang diterima oleh masyarakat lokal masih sangat terbatas. Selain itu, dampak lingkungan dari ekstraktivisme juga signifikan, dengan tingkat kerusakan yang tinggi dan minimnya upaya rehabilitasi lingkungan. Masyarakat adat, sebagai kelompok yang paling terdampak, sering kali tidak mendapatkan hak yang setara, baik dalam hal kompensasi ekonomi maupun pengakuan atas tanah adat mereka.

Sebagai penutup, penelitian ini telah mengungkapkan kompleksitas dan ketimpangan yang ditimbulkan oleh kebijakan ekstraktivisme di Indonesia, khususnya di wilayah Papua. Melalui pendekatan deskriptif, jelas terlihat bahwa meskipun sektor ekstraktif memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan pada pendapatan negara, distribusi keuntungan yang dihasilkan belum merata, terutama bagi masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh operasi pertambangan. Dampak lingkungan yang merusak, ketidakadilan dalam hak kepemilikan tanah adat, serta keterbatasan dalam akses terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi semakin memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi di wilayah-wilayah ini. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam dapat didistribusikan secara lebih merata, sembari mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memperkuat hak-hak masyarakat adat. Reformasi kebijakan ini tidak hanya penting untuk memperbaiki kesejahteraan lokal, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia dapat berlanjut tanpa mengorbankan keadilan social, ekonomi dan kelestarian lingkungan.

## REFERENSI

### Buku:

Caporaso, J. A., & Levine, D. P. (1992). *Theories of Political Economy*. Cambridge University Press.

**Jurnal:**

- Anderson, K. (2019). Freeport in Indonesia: History of Mining and the Grasberg Gold Mine. *Indonesia Journal of History*, 42(3), 56-73.
- Filer, C. (2012). The Double Movement of Immovable Property Rights in Papua New Guinea. *Journal of Pacific History*, 47(1), 51-73.
- Heinberg, R. (2017). The Resource Curse and the Indonesian Freeport. *Environmental Politics*, 22(5), 123-145.
- Hidayatulloh, H., Erdos, E., & Szabó, M. (2022). The Intricate Justice of Poverty: A Case of the Land of Gold in Indonesian Papua. *JILS.unnes.ac.id*
- Kusumaryati, V. (2021). Freeport and the States: Politics of corporations and contemporary colonialism in West Papua. *Comparative Studies in Society and History*. [HTML]
- Lane, M. (2019). Freeport's Transition in Indonesia: Control and Controversies. *Resource Economics*, 11(2), 101-115.

**Laporan:**

- Amnesty International. (2017). Indonesia: Mining and Indigenous Rights in Papua. Diakses dari <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/0015/2017/en/>.
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (2019). Evaluasi Dampak Sosial-Ekonomi Ekstraktivisme di Daerah Papua. BPPT.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Indeks Gini Menurut Provinsi 2021. Diakses dari <https://www.bps.go.id/>.
- Freeport-McMoRan. (2020). 2020 Annual Report. Diakses dari <https://www.fcx.com/>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 2020. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/>.
- Oxfam. (2019). Towards a More Equal Indonesia: How Public Policies Can Tackle Inequality. Diakses dari <https://www.oxfam.org/>.
- PT Freeport Indonesia. (2020). Laporan Keberlanjutan 2020. Diakses dari <https://ptfi.co.id/>.
- World Bank. (2020). Indonesia Economic Quarterly: The Power of Partnership. Diakses dari <https://www.worldbank.org/>.
- World Resources Institute. (2019). Sustainable Mining in Indonesia: Evaluating the Impact of Freeport and Other Mining Giants. WRI.